



Pelayanan publik dasar Bidang Pendidikan tentang sarana dan prasana di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai

Risma Niswaty¹, Muhammad Nasrullah², Nasaruddin H.³
^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Abstract. This study aims to find out the basic public services in the field of education about facilities and infrastructures in Pulau Sembilan District, Kab. Sinjai. The technique of collecting data uses three ways, namely Observation, Interview and Documentation, while the focus of this research is Affordability Distance of Educational Units, Number of Students in Each Class Group, Availability of Teacher Spaces, Availability of Text Books and Reflecting Factors, and Descriptive Qualitative methods. From the results of the study, it is known that so far the Sinjai District Government has policies related to the fundamental problems of the unequal access of junior high school and senior high school education in Pulau Sembilan District, Kab. Sinjai, specific geographical conditions of the region (islands). There are two aspects that are interrelated with these problems, namely: a) aspects of equitable access to education, and b) aspects of equitable spatial accessibility, where both aspects greatly influence the equitable access to school education and on indicators of facilities and infrastructure, research findings indicate indicators that meet standards the minimum service of basic education is the affordability of the distance of the education unit, the number of students in each class group, the completeness of the class, the availability of the teacher's room and its completeness, the availability of enrichment books and reference books.

Keywords: public service, education, facilities and infrastructure

1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan jasa yang diperlukan masyarakat. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan. Disadari bahwa kondisi aparatur negara masih dihadapkan pada sistem manajemen pemerintahan yang belum efisien dan lemah yang antara lain menghasilkan kualitas pelayanan publik yang rendah dan terjadi berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengakibatkan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan pelayanan publik bagi pemerintahan adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV yaitu kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi sasarannya adalah rakyat pemegang kekuasaan pada negara demokrasi. Negara kita adalah negara demokrasi bukan negara kekuasaan, jadi cirinya ialah bahwa hak asasi warga negara harus menjadi tujuan utama. Oleh karena itu pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemerintahan yang melakukan tugas, wewenang dan kewajiban secara terbuka (transparan), efektif, efisien, akuntabel dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara atau non pemerintah adalah pelayanan publik sasaran hasilnya mengedepankan kepentingan publik.

Salah satu bidang pelayanan publik yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat ialah pelayanan publik di bidang pendidikan. Pada hakikatnya pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga Negara Indonesia

untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Secara filosofis tanggung jawab pendidikan melekat pada keluarga, masyarakat dan pemerintah. Mengingat hal tersebut, maka pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencetak generasi yang berkualitas untuk meneruskan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Peranan pendidikan diantaranya adalah mempersiapkan siswa agar memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk disumbangkan bagi kesejahteraan umum sebagai warga negara yang aktif.

Permasalahan di dalam dunia pendidikan di daerah kepulauan, tertinggal atau terpinggirkan telah lama kita sadari. Masalah-masalah tersebut diantaranya meliputi pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan, efektifitas dan efisiensi pendidikan Namun, dengan dalih keterbatasan pembiayaan, akses transportasi sulit dijangkau, serta berbagai peraturan berlaku selalu dijadikan alasan untuk menunda pemecahan masalah tersebut. Sebagai ilustrasi betapa sulitnya menempatkan tenaga guru di daerah-daerah kepulauan. Berbagai persoalan pelayanan pendidikan di daerah kepulauan seperti membangun sarana pendidikan standar karena kesulitan komunikasi atau langkanya alat-alat bantu proses belajar mengajar, anak-anak belum terlayani pendidikannya, angka putus sekolah yang masih tinggi, juga masalah kekurangan guru, begitu pula tuntutan sistem pendidikan yang standar mengenai jenjang pendidikan serta kurikulum nasional menghambat daerah kepulauan untuk mengejar ketertinggalan.

Berbagai masalah pendidikan daerah terpencil dipengaruhi oleh berbagai masalah eksternal di luar sistem pendidikan tersebut, antara lain, 1) perkembangan IPTEK. Perkembangan IPTEK dibagi menjadi tiga aspek yaitu, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi dan perkembangan seni. 2) laju pertumbuhan penduduk yang pesat. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat akan menyebabkan perkembangan masalah pemerataan, misalnya jumlah anak usia sekolah akan semakin besar atau banyak, jika daya tampung sekolah tidak bertambah maka secara otomatis sebagian dari mereka tidak akan terlayani dalam bidang pendidikan. 3) keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Masyarakat yang umumnya berada di daerah terpencil dengan ekonomi lemah dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Perkembangan masalah yang timbul dari hal ini adalah bagaimana sistem pendidikan dapat menjangkau dan melibatkan mereka dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga mereka keluar dari keterbelakangan tersebut. Masalah eksternal yang terakhir adalah aspirasi masyarakat.

Mengacu pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 45 bahwa "setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik". Hal ini sering dilihat terdapatnya perbedaan yang antara lembaga pendidikan yang berada di pelosok daerah kepulauan dengan lembaga pendidikan yang berada di kota besar yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Di sinilah sering terjadinya diskriminasi dan persaingan tidak seimbang antar lembaga pendidikan. Seharusnya pemerintah dalam hal ini mengambil suatu tindakan untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar kesenjangan tersebut dapat diatasi dan kualitas, kepuasan serta mutu pendidikan dapat terjaga dari mulai daerah terpencil, kepulauan sampai kota-kota besar sehingga Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. Pengumpulan data menggunakan beberapa cara yakni observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah data model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Milles et al. (2014) bahwa dalam analisis data deskriptif kualitatif mencakup 1) pengumpulan data, 2) reduksi data atau penyederhanaan data (*data reduction*), 3) penyajian

data (*data display*), dan 4) kesimpulan, penarikan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelayanan Publik Dasar Bidang Pendidikan tentang Sarana dan Prasana

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam suatu proses pembelajaran karena dapat menambah minat siswa terhadap proses belajar mengajar skaligus dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kurangnya prestasi siswa selain di pengaruhi oleh tenaga pengajar juga di pengaruhi oleh sarana dan prasarana yang tidak memadai. Program evaluasi setidaknya menjadi alat penting untuk pengembangan peserta didik terutama dalam bidang olahraga, agar dapat menggali bakat-bakat yang terpendam dalam diri siswa. Hal ini yang seharusnya mejadi program pemerintah agar dapat mengetahui siklus pendidikan yang ada pada tiap-tiap sekolah dengan penerapan kurikulum yang ada, agar dapat mengetahui pengembangan bahan ajar, penerapan kurikulum dan hasil belajar siswa.

B. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

- 1) Peningkatan pendidikan bagi anak usia dini yang lebih merata dan bermutu agar semua potensi anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat usia sehingga mereka memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
- 2) Peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara untuk mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sebagaimana diamanatkan yang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah, baik umum maupun kejuruan, untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan Sekolah Menengah Pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas;
- 4) Pemberian perhatian yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung dalam menjangkau layanan pendidikan, baik formal maupun nonformal sesuai dengan potensi dengan dan kebutuhannya, yaitu penduduk miskin, tinggal di daerah terpencil, kepulauan, daerah konflik dan daerah yang kinerja pendidikannya di bawah rata-rata nasional terutama daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah, anak cacat, serta anak-anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa baik laki-laki maupun perempuan;



- 5) Peningkatan perluasan layanan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja serta dapat menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- C. *Faktor Determinan Pelayanan Sarana dan Prasarana Pendidikan*
- 1) Faktor pendukung
 - a) Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berkualitas, multitalenta dan sudah bergelar Sarjana. Dalam pelaksanaan kebijakan sekolah, sekolah membutuhkan agen pelaksana dalam hal ini tenaga pendidik dan pendidik untuk melaksanakan kebijakan yang ada dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing agen pelaksana. Dengan tingkat pendidikan yang mayoritas sudah bergelar sarjana memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada di sekolah.
 - b) Adanya dukungan dari pihak eksternal lainnya. Seperti lingkungan masyarakat, lingkungan pemerintah, dan lingkungan keluarga.
 - 2) Faktor penghambat
 - a) Rendahnya kualitas sarana fisik
Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.
 - b) Tidak meratanya tenaga pengajar
Tidak meratanya penempatan guru serta tidak rasionya jumlah guru dan siswa sehingga mempengaruhi kualitas mutu pendidikan.
 - c) Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan
Dengan kondisi geografis Kecamatan Pulau Sembilan sehingga salah satu permasalahan dalam pendidikan untuk SMP dan SMA/SMK tidak merata.
 - d) Sarana transportasi
Untuk melanjutkan pendidikan ke SMP dan SMA/SMK lulusan SD mesti menyebrang sungai untuk dapat melanjutkan sekolah salah satu persoalan yang dihadapi adalah tidak tersedianya sarana transportasi laut mereka harus menggunakan perahu sendiri.

4. KESIMPULAN

- a. Permasalahan mendasar tidak meratanya akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai.

- b. Kondisi geografis wilayah yang spesifik (daerah kepulauan). Ada dua aspek yang saling terkait dengan permasalahan tersebut yaitu a) aspek pemerataan aksesibilitas pendidikan, dan b) aspek pemerataan aksesibilitas spasial, dimana kedua aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap pemerataan akses pendidikan sekolah.
- c. Pada indikator sarana dan prasarana, temuan penelitian menunjukkan indikator yang memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah keterjangkauan jarak satuan pendidikan, jumlah siswa dalam setiap rombongan kelas, kelengkapan kelas, ketersediaan ruang guru dan kelengkapannya, ketersediaan buku pengayaan dan buku referensi.
- d. Faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah faktor lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.